

## **ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI UPT SDN 386 GRESIK**

**Mohammad Adnan<sup>1</sup>, Roni Hidayat<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean

Jl. Raya Kebonagung Lebak, RT 2 RW 3, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura,  
Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61181

[adnan.bawean@gmail.com](mailto:adnan.bawean@gmail.com)<sup>1</sup>, [telukjati1234@gmail.com](mailto:telukjati1234@gmail.com)<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki peran krusial dalam menjamin keberlangsungan dan mutu layanan pendidikan dasar di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana BOS di UPT SDN 386 Gresik, mencakup aspek perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS pada dasarnya telah mengikuti ketentuan juknis, namun masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya pelibatan komite sekolah dalam pengambilan keputusan, serta pelaporan yang belum sepenuhnya memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam aspek pelaporan aset. Temuan juga menunjukkan bahwa penggunaan dana BOS telah difokuskan pada kegiatan prioritas seperti pengembangan perpustakaan, pelatihan guru, dan kegiatan pembelajaran. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas manajerial sekolah, peningkatan partisipasi pemangku kepentingan, serta konsistensi pelaporan berbasis regulasi sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan efektivitas dana BOS dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

**Kata kunci:** Bantuan Operasional Sekolah, BOS, manajemen keuangan sekolah, transparansi, akuntabilitas.

### **ABSTRACT**

*The management of School Operational Assistance (BOS) funds plays a crucial role in ensuring the continuity and quality of basic education services in Indonesia. This study aims to analyze the management of BOS funds at UPT SDN 386 Gresik, focusing on aspects of planning, disbursement, utilization, and reporting. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that although the BOS fund management generally follows official technical guidelines, several challenges remain, such as delays in fund disbursement, limited involvement of school committees in decision-making, and incomplete financial reporting particularly regarding asset documentation. The utilization of BOS funds is mainly directed toward priority activities such as library development, teacher training, and learning activities. This study recommends strengthening the managerial capacity of school staff, increasing stakeholder participation, and improving regulatory-based financial reporting as strategic steps to optimize the effectiveness of BOS funds in supporting the achievement of national education goals.*

**Keywords:** School Operational Assistans, BOS, school financial management, transparency, accountability,



## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sarana utama dalam kemampuan berpikir sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia sepanjang hidup dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman teknologi dan budaya masyarakat. Namun pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan pribadi semata melainkan juga sebagai akar dari pembangunan karakter anak bangsa dan Negara. Pendidikan dipandang sebagai suatu sarana yang membangun mutu sumber daya bangsa dan karakter bangsa. Bangsa yang sukses merupakan bangsa yang perhatian akan pendidikan dan dapat menghasilkan pencapaian prestasi pendidikan bangsa yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi bangsa yang bertanggungjawab (Dedi Supriyadi, 2023).

Berbicara terkait pendidikan pasti tidak akan pernah lepas dengan adanya unsur pendukung dalam keberhasilannya suatu pendidikan, salah satunya adalah dana dan anggaran pendidikan. Dana pendidikan merupakan faktor penunjang dalam melahirkan siswa atau siswi yang berkelas. Sekolah UPT SDN 386 Gresik mengutamakan dana dalam mencukupi berbagai keperluan sekolah, seperti gaji pegawai, biaya transportasi, dan biaya penyelenggara pendidikan lainnya. Sekolah Dasar diberikan Dana BOS secara umum oleh pemerintah. Guna menghasilkan akomodasi pendidikan yang terjangkau dan berbobot untuk masyarakat. Dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan program pemerintah yang pada dasarnya mengelola pendanaan biaya operasional non personalia, seperti biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung seperti listrik, air, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi.

Perselisihan instruktif di Indonesia adalah terbatasnya penerimaan sekolah, terutama bagi orang miskin. Masih banyak anak negeri yang masih muda yang tidak bisa sekolah karena beberapa faktor, terutama komponen finansial. Berdasarkan keadaan ini maka perlu adanya perubahan mengenai hak setiap warga untuk mendapatkan pendidikan agar dapat memenuhi seperti halnya untuk mencapai tujuan program, mereka harus belajar 6 tahun sekolah dasar. Biaya pendidikan menjadi salah satu komponen yang penting dalam tercapainya tujuan dari pendidikan itu sendiri sehingga, biaya pendidikan akan dialokasikan guna memberikan pembiayaan bagi terlaksananya pendidikan yang berkualitas mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Salah satu bagian dari pemerintah adalah untuk mengurangi keterambilan pengajaran di Indonesia, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS yang telah disampaikan sejak Juli 2005 telah memainkan peran yang sangat vital dalam mencapai tujuan instruktif. Pendidikan adalah usaha pembelajaran berupa pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan. Pendidikan merupakan pembelajaran yang dialami langsung dalam lingkungan hidup. Pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan (Nasution, 2017). Suatu wadah untuk memfasilitasi kebutuhan serta keinginan masyarakat dalam menggali ilmu pengetahuan disebut dengan sekolah. (Permata Puteri & Windarto, 2023).



Sekolah Dasar (SD) merupakan salah satu bentuk penyelenggara suatu pendidikan. SD termasuk lembaga pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah sebagai entitas akuntansi dan pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan aturan yang ditetapkan. Sekolah UPT SDN 386 Gresik memiliki wewenang dalam mengelola keuangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan dan diharapkan dana yang beredar dapat di manfaatkan dengan optimal. Pengelolaan keuangan menjadi salah satu hal penting yang ada di setiap organisasi, karena dengan dilakukan pengelolaan keuangan yang baik akan sangat membantu memperlancar segala kegiatan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Selain itu, pihak pemerintah juga memberikan wewenang agar sekolah UPT SDN 386 Gresik dapat mencari sumber keuangan yang bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah berlaku. Kegiatan tersebut dinamakan dengan kegiatan pendanaan pendidikan (Gita, 2020).

Banyaknya permasalahan yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang rendah, menyebabkan kualitas sumber daya manusia yang ada pun rendah. Pendidikan merupakan wadah pembentukan karakter bangsa. Tanpa pendidikan yang baik maka perwujudan untuk menjadi Negara besar dan berwibawa sulit sekali tercapai. Karena adanya permasalahan-permasalahan inilah yang menyebabkan pemerintah memberikan kebijakan khususnya dalam bidang pendidikan. Salah satu bentuk kebijakan yang diberikan pemerintah yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Negara menjamin hak pendidikan bagi tiap warganya melalui penyediaan anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari APBN. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan, perlu mengalokasikan dan menyalurkan dana bantuan operasional sekolah (Permendikbudristek No. 6 Tahun 2021). Munculnya program dana BOS sebagai kompensasi bidang pendidikan yang ditujukan untuk menyukseskan program wajib belajar. Menurut undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, BOS merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. Program ini merupakan realisasi atau implementasi kebijakan dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan (UU RI No. 20 tahun 2003).

BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional dan personalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah dikomandani oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dalam pelaksanaannya penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementrian Agama. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 26 Tahun 2014, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional dan personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai program wajib belajar (Rahayuningsih, 2021).

Pengembangan sekolah UPT SDN 386 Gresik secara menyeluruh akan menjadi dasar perencanaan dan penggunaan dana BOS oleh kepala sekolah tertentu, baik pengembangan jangka panjang maupun jangka pendek. Adapun yang dimaksud dengan pengembangan jangka panjang adalah pengembangan sekolah dalam lima tahun ke depan sedangkan pengembangan jangka pendek adalah pengembangan sekolah dalam satu tahun ke depan. Bantuan dana BOS yang diterima oleh sekolah UPT SDN 386 Gresik dipertanggung



jawabkan serta dilaporkan kepada dinas pendidikan provinsi dan pusat sebagai pengawas eksternal dan dipertanggung jawabkan juga kepada komite dan dinas pendidikan kabupaten Gresik sebagai pengawas internal. Secara umum dana yang dilaporkan berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan dana BOS (Halik, A., Hidayati, N., & Amin, M. 2018).

Pihak sekolah sudah mendapat bantuan dari pemerintah berupa dana BOS yang seharusnya bisa digunakan sesuai dengan pembiayaan yang diatur oleh Juknis BOS namun fakta di lapangan terdapat ruang kelas yang mengalami kerusakan. Diketahui bahwa masih kurangnya partisipasi komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS dimana komite sekolah hanya terlibat pada saat perencanaan padahal menurut Juknis BOS menyebutkan bahwa pengelolaan dana BOS di sekolah harus berdasarkan keputusan bersama antara kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah mulai dari perencanaan BOS sampai pada tahap pelaporan.

Pihak pengelola BOS di UPT SDN 386 Gresik tidak melakukan pelaporan aset padahal dalam Juknis BOS dijelaskan bahwa dokumen laporan yang harus disampaikan oleh sekolah yaitu laporan realisasi penggunaan dana setiap sumber dana, rekapitulasi realisasi penggunaan BOS, pencatatan pelayanan dan pengaduan masyarakat, laporan aset. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat berbagai permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan dana BOS, hal tersebut menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPT SDN 386 Gresik Kecamatan tambak Kabupaten Gresik” untuk mengetahui secara mendalam pengelolaan dana BOS dalam aspek perencanaan, penyaluran, penggunaan, pembukuan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh pihak pengelola BOS di UPT SDN 386 Gresik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPT SDN 386 Gresik. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna dari proses pengelolaan dana BOS melalui interpretasi terhadap data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Jenis penelitian ini bersifat field research (penelitian lapangan), karena peneliti terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data secara faktual (Futaqi & Machali, 2019).

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung pelaksanaan pengelolaan dana BOS, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Wawancara mendalam dilakukan kepada kepala sekolah, bendahara BOS, dan guru yang bersangkutan, untuk mendapatkan informasi lebih rinci mengenai pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), laporan penggunaan dana BOS, serta foto kegiatan sebagai bukti pelaksanaan penelitian (Zuldafrial, 2021).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis kualitatif interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring data sesuai fokus penelitian. Data yang telah diseleksi kemudian disusun dalam bentuk narasi sehingga dapat ditafsirkan dan



dianalisis lebih lanjut, dan akhirnya ditarik kesimpulan yang terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung (Zakariah et al., 2020).

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu (Hakiki, 2023). Dengan demikian, data yang diperoleh dapat diuji validitasnya melalui perbandingan dari berbagai perspektif dan metode.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Pertama*, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain-lain. Namun demikian ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Anggun Hilendri, Rahmah, 2022).

Secara umum program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri maupun swasta
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sasaran program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah semua Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta diseluruh provinsi di Indonesia (Putri, Arif Budiman, 2021).

*Kedua*, pengelolaan dana BOS di UPT SDN 386 Gresik mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui petunjuk teknis (Juknis) BOS. Berikut adalah proses pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut:

1. Perencanaan

Sekolah membentuk tim manajemen BOS yang bertugas menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS ini disusun berdasarkan kebutuhan sekolah dan harus disetujui oleh kepala sekolah serta komite sekolah. Proses perencanaan dana BOS tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik karena telah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada pada Permendikbud nomor SE 8787/C/PR.04.01/2023. Hal ini dapat dilihat dari perencanaan anggaran BOS yang diawali dari rapat dewan guru dalam penentuan standar pembiayaan untuk



perencanaan anggaran dengan tujuan menentukan prioritas anggaran yang paling dibutuhkan yang kemudian diintegrasikan ke dalam sistem aplikasi RKAS (ARKAS) guna mempermudah pengelolaan dana BOS.

Satuan pendidikan dapat memulai perencanaan tata kelola Dana BOS Tahun 2024 melalui ARKAS 4. Hal ini menyesuaikan dengan arahan baru terkait perencanaan pada ARKAS 4 di mana satuan pendidikan dapat mulai melakukan pengisian kertas kerja BOS Reguler tahun anggaran tahun berikutnya (T-1). Dengan perencanaan T-1 pada ARKAS 4. Satuan pendidikan diharapkan dapat mulai mengisi kertas kerja tahun anggaran selanjutnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses konsolidasi anggaran satuan pendidikan ke dalam anggaran dinas untuk perencanaan anggaran daerah (RAPBD). Hal ini sejalan dengan rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melibatkan dinas secara aktif pada percepatan perencanaan anggaran satuan pendidikan 2024 mulai September 2023. Perencanaan T-1 diharapkan bisa membuat pengelolaan anggaran dapat dilakukan lebih efektif dan efisien dalam administrasi keuangan baik di sekolah maupun di daerah (Hatman, 2024).

## 2. Penerimaan Dana

Dana BOS disalurkan secara berkala melalui transfer ke rekening sekolah. Sekolah menerima dana ini dalam beberapa tahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pencairan dana BOS APBN itu dua tahap: Tahap pertama biasanya cair bulan Januari atau Februari, Tahap kedua biasanya cair pada bulan Juli atau Agustus, dan untuk pencairan di bank disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam ARKAS. Pencairan Dana BOS APBD disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam pengeluaran, dimana sekolah membuat SPJ dalam pencairan BOS (Utomo, 2019).

## 3. Pengelolaan dan Penggunaan BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPT SDN 386 Gresik difokuskan pada berbagai pos anggaran strategis yang mencerminkan upaya peningkatan mutu pendidikan dan efisiensi manajemen sekolah. Secara umum, dana tersebut dialokasikan untuk pembelian buku, alat pembelajaran, perbaikan infrastruktur, biaya ekstrakurikuler, hingga pengembangan sumber daya manusia. Adapun rincian spesifik penggunaan dana BOS mencakup:

### a. Pengembangan perpustakaan

Penguatan fungsi perpustakaan penting sebagai sumber literasi. Investasi pada koleksi buku dan fasilitas pendukung merupakan langkah fundamental dalam menciptakan budaya baca dan mendukung program merdeka belajar. Ini juga relevan dengan indikator mutu sekolah menurut Standar Nasional Pendidikan (SNP).

### b. Kegiatan penerimaan siswa baru

Penggunaan dana untuk kegiatan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) menunjukkan kesadaran akan pentingnya penyambutan awal yang baik demi kenyamanan dan integrasi siswa. Ini mencerminkan pendekatan holistik dalam pendidikan yang tidak hanya fokus pada pengajaran, tetapi



- juga pengalaman siswa secara menyeluruh.
- c. Kegiatan pembelajaran intra dan ekstrakurikuler  
Dana ini berkontribusi langsung pada pembelajaran aktif dan pengembangan soft skills siswa. Kegiatan ekstrakurikuler juga merupakan sarana penting untuk menanamkan nilai-nilai karakter, kreativitas, dan kepemimpinan yang tidak didapat dari pembelajaran formal saja.
  - d. Kegiatan ujian dan ulangan  
Pembiayaan untuk kegiatan asesmen mencerminkan komitmen terhadap evaluasi pembelajaran yang sistematis. Hal ini penting untuk memastikan capaian kompetensi siswa dan sebagai alat ukur efektivitas pembelajaran guru.
  - e. Pengadaan barang habis pakai  
Pengeluaran untuk alat tulis, bahan praktik, dan peralatan penunjang lainnya adalah kebutuhan rutin yang menopang kegiatan operasional harian. Ini adalah aspek logistik yang tidak boleh diabaikan dalam keberlangsungan aktivitas pembelajaran.
  - f. Langganan daya dan jasa  
Pembayaran listrik, air, dan internet merupakan bagian dari biaya tidak langsung yang krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif. Di era digital, konektivitas menjadi elemen vital dalam pendidikan berbasis teknologi.
  - g. Perawatan sekolah  
Dana untuk perawatan sarana dan prasarana merupakan langkah preventif agar fasilitas sekolah tetap layak dan aman digunakan. Ini juga menekan biaya jangka panjang akibat kerusakan yang lebih parah bila tidak ditangani.
  - h. Gaji honorarium bulanan  
Pemberian honorarium kepada tenaga pendidikan non-PNS adalah bentuk apresiasi dan strategi menjaga kinerja serta stabilitas SDM di sekolah. Meski menimbulkan tantangan akuntabilitas, langkah ini menjadi solusi praktis terhadap keterbatasan formasi guru ASN.
  - i. Pengembangan profesi guru  
Investasi dalam pelatihan dan workshop guru sangat strategis dalam konteks peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional. Dana BOS diarahkan untuk mendukung prinsip pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) bagi pendidik.
  - j. Bantuan untuk siswa miskin  
Alokasi ini mencerminkan nilai keadilan sosial dalam pendidikan. Dukungan finansial bagi siswa kurang mampu memastikan akses dan keberlanjutan pendidikan, sejalan dengan tujuan wajib belajar 12 tahun.
  - k. Pembayaran pengelolaan BOS  
Sebagian dana juga digunakan untuk keperluan administrasi pengelolaan dana BOS itu sendiri, seperti penyusunan laporan, dokumentasi, dan operasional tim manajemen BOS. Ini penting untuk menjamin



akuntabilitas dan pelaporan yang sesuai juknis.

l. Pembelian perangkat computer

Investasi dalam sarana teknologi seperti komputer sangat relevan dalam menjawab tantangan digitalisasi pendidikan. Ketersediaan perangkat TIK akan meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis digital, serta mendukung administrasi sekolah yang modern dan efisien.

Secara keseluruhan, alokasi penggunaan dana BOS di UPT SDN 386 Gresik sudah mencerminkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam manajemen pendidikan. Pemanfaatan yang beragam juga menunjukkan pemahaman bahwa kualitas pendidikan bukan hanya tentang pengajaran, tetapi juga tentang dukungan sistemik—baik dari aspek sumber daya, lingkungan belajar, maupun kesejahteraan peserta didik.

Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, meski penggunaan dana tersebar ke banyak pos, hal ini justru berisiko apabila tidak diimbangi dengan prioritas kebutuhan dan evaluasi berkala. Misalnya, pembelian perangkat komputer tanpa pelatihan TIK bagi guru bisa menjadi investasi yang tidak maksimal. Kedua, minimnya pelibatan komite sekolah dalam tahap penggunaan dan evaluasi, seperti yang disinggung dalam laporan, berpotensi melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan prinsip utama dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan Permendikbud No. 6 Tahun 2021.

Dengan demikian, meski penggunaan dana BOS telah diarahkan ke aspek-aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan, efektivitas implementasinya masih sangat tergantung pada kualitas manajemen, keterbukaan informasi, dan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja (RKAS) yang disusun secara partisipatif.

4. Pelaporan dan Evaluasi

Pelaporan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan publik, khususnya dalam sektor pendidikan dasar. Berdasarkan temuan penelitian, SDN UPT 386 Gresik telah melaksanakan pelaporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan masyarakat melalui komite sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, sekolah telah mematuhi ketentuan dalam Permendikbud, baik dari sisi pelaporan teknis maupun publikasi informasi penggunaan anggaran.

Langkah ini patut diapresiasi, karena sejatinya pelaporan keuangan tidak hanya bertujuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Melibatkan komite sekolah dalam publikasi laporan menandakan adanya semangat partisipatif yang sesuai dengan semangat pengelolaan berbasis masyarakat (*school-based management*).

Namun, permasalahan muncul ketika praktik ideal tersebut terhambat oleh faktor eksternal, yaitu keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah. Kondisi



ini menciptakan efek domino yang berpotensi merugikan kualitas pelaporan. Dalam konteks ini, penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dilakukan secara terburu-buru tidak hanya mengurangi kualitas laporan dari sisi kelengkapan dan akurasi data, tetapi juga membuka celah risiko kesalahan administratif atau penyimpangan kecil akibat tekanan waktu.

Perlu diketahui bahwa akuntabilitas bukan hanya bergantung pada niat dan kapasitas internal sekolah, tetapi juga pada dukungan sistemik dari pemerintah sebagai pemilik kebijakan. Ketika proses penyaluran dana tidak berjalan tepat waktu, maka beban administratif sekolah menjadi tidak proporsional. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip manajemen anggaran yang menekankan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara simultan.

Selain itu, kondisi keterlambatan tersebut berisiko merusak integritas sistem pelaporan yang sebenarnya telah dibangun dengan baik. Ketika pelaporan hanya menjadi formalitas karena dikejar tenggat waktu, maka tujuan utamanya sebagai alat monitoring dan evaluasi menjadi tidak optimal. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data dan mempersempit ruang inovasi dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Dari perspektif *governance publik*, situasi ini menunjukkan perlunya sinergi lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah. Pelaporan berkala yang dilakukan UPT SDN 386 Gresik harus diimbangi dengan komitmen negara dalam menjamin ketepatan waktu penyaluran, sehingga siklus manajemen BOS tidak mengalami disrupti. Selain itu, peningkatan kompetensi tim pengelola BOS dalam aspek administrasi dan pelaporan juga perlu diperkuat agar kualitas laporan tetap terjaga meskipun dalam situasi tekanan waktu.

*Ketiga*, Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan pendidikan dasar menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Di SDN 386 Gresik, ketiga tantangan utama yang teridentifikasi yakni transparansi dan akuntabilitas, keterbatasan sumber daya, serta kepatuhan terhadap aturan—mencerminkan problematika klasik dalam manajemen keuangan sektor publik pendidikan yang masih berlangsung hingga saat ini.

#### 1. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dalam pengelolaan dana BOS tidak sekadar tentang menyusun laporan keuangan, tetapi juga menyangkut keterbukaan informasi dan pelibatan publik dalam setiap tahap pengambilan keputusan. SDN 386 Gresik berupaya menjaga akuntabilitas dengan menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan dan masyarakat melalui komite sekolah. Namun, dalam praktiknya, tantangan utama justru terletak pada minimnya partisipasi aktif komite dan orang tua, yang hanya dilibatkan secara simbolis pada tahap perencanaan. Hal ini dapat menimbulkan persepsi publik bahwa dana digunakan secara tertutup, meskipun laporan telah dibuat.

Dari perspektif *governance publik*, akuntabilitas sejati hanya akan terwujud jika terdapat kontrol sosial yang hidup di tingkat satuan pendidikan. Transparansi yang efektif bukan hanya administratif, tetapi juga komunikatif dan partisipatif.



Oleh karena itu, sekolah perlu mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih substansial, misalnya melalui forum evaluasi triwulan atau pelaporan digital yang mudah diakses publik.

## 2. Keterbatasan Sumber Daya

Masalah keterbatasan dana merupakan dilema klasik dalam pendidikan publik. Meskipun dana BOS dirancang untuk menutupi kebutuhan operasional non-personalia, pada kenyataannya, alokasi yang diterima SDN 386 Gresik belum mencukupi untuk membiayai berbagai aspek penting seperti renovasi infrastruktur dan pengadaan teknologi pendidikan. Sementara tuntutan terhadap kualitas pembelajaran semakin meningkat, kemampuan fiskal sekolah justru masih sangat terbatas.

Situasi ini mengindikasikan adanya *mismatch* antara kebijakan dan realitas kebutuhan lapangan. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian kuantitatif dalam kebijakan BOS agar lebih berpihak pada sekolah dengan kondisi fisik terbatas atau berlokasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Selain itu, sekolah juga dapat didorong untuk menjalin kemitraan dengan pihak swasta (CSR), atau menggalakkan sumber pendanaan alternatif berbasis komunitas dan filantropi lokal.

## 3. Kepatuhan terhadap Aturan

Regulasi penggunaan dana BOS sebagaimana tertuang dalam Permendikbud dan Juknis BOS sangat ketat, dan setiap penyimpangan bisa berujung pada sanksi administratif maupun hukum. Hal ini menciptakan situasi dilematis bagi sekolah: di satu sisi, kebutuhan riil di lapangan kadang tidak tercakup dalam juknis; di sisi lain, penggunaan dana di luar ketentuan bisa berisiko. SDN 386 Gresik harus berhati-hati dalam menavigasi zona abu-abu ini.

Kondisi ini menggambarkan ketegangan antara kepatuhan dan kebutuhan lapangan. Sekolah membutuhkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan agar bisa responsif terhadap kebutuhan aktual, tetapi regulasi yang kaku kadang menjadi penghambat. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan desentralisasi terkontrol dan pembaruan juknis yang bersifat adaptif, berbasis masukan dari sekolah, serta pelatihan rutin untuk meningkatkan pemahaman teknis tim BOS.

*Keempat*, dalam konteks pengelolaan keuangan sekolah, terutama dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga menyentuh aspek manajerial dan partisipatif. Berdasarkan hasil temuan, terdapat tiga langkah strategis yang diajukan SDN 386 Gresik untuk mengoptimalkan penggunaan dana BOS, yaitu peningkatan kapasitas pengelola BOS, penguatan transparansi melalui pelibatan komite, dan perencanaan yang lebih matang dan terukur. Ketiganya merupakan elemen kunci yang saling berkelindan dan memengaruhi kualitas tata kelola dana pendidikan.

### 1. Peningkatan Kapasitas Pengelola BOS

Salah satu akar persoalan dalam pengelolaan dana BOS adalah kurangnya pemahaman teknis terhadap juknis dan regulasi. Ketidaktahuan ini bukan semata-mata kesalahan individu, melainkan juga konsekuensi dari minimnya



pelatihan dan pembinaan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelatihan rutin kepada tim pengelola BOS merupakan prasyarat fundamental bagi efektivitas pengelolaan.

Argumentasi penting di sini adalah bahwa kompetensi manajerial menentukan akuntabilitas dan efisiensi anggaran. Tanpa kapasitas yang memadai, sekolah rentan melakukan kesalahan administratif atau bahkan pelanggaran aturan secara tidak sengaja. Pelatihan yang berkelanjutan dan kontekstual akan meningkatkan literasi keuangan sekolah serta kemampuan mereka dalam menggunakan aplikasi seperti ARKAS secara optimal. Pelatihan ini juga harus bersifat dua arah, yakni tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan kendala teknis yang dialami sekolah agar kebijakan pusat bisa lebih responsif.

## 2. Transparansi dan Keterlibatan Komite Sekolah

Pelibatan komite sekolah dan orang tua dalam pengelolaan dana BOS bukan hanya soal formalitas administratif, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial dan upaya membangun legitimasi publik. Dalam kerangka manajemen berbasis sekolah (MBS), keterlibatan masyarakat adalah instrumen utama untuk memastikan bahwa keputusan keuangan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi pemangku kepentingan.

Secara argumentatif, transparansi yang baik akan memperkecil peluang penyimpangan, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat legitimasi kebijakan sekolah. Jika komite dilibatkan secara aktif melalui rapat periodik dan akses terhadap laporan keuangan, maka proses check and balance akan terjadi secara alamiah. Selain itu, keterbukaan informasi keuangan juga dapat memicu partisipasi yang lebih besar dari masyarakat, baik dalam bentuk dukungan moral maupun material.

## 3. Perencanaan yang Lebih Matang dan Terukur

Perencanaan yang baik adalah fondasi utama pengelolaan keuangan yang efektif. Dalam konteks dana BOS, perencanaan tidak hanya berarti menyusun RKAS, tetapi juga menilai skala prioritas, menyesuaikan dengan kebutuhan riil sekolah, serta mengantisipasi risiko keterlambatan dana. Perencanaan yang terukur mencegah pemborosan, menghindari pengeluaran yang tidak berdampak langsung terhadap mutu pendidikan, dan memastikan bahwa anggaran benar-benar menyasar program-program yang relevan.

Secara argumentatif, jika perencanaan dilakukan dengan pendekatan evidence-based dan berbasis data, maka alokasi dana akan menjadi lebih strategis dan tepat guna. Tim manajemen sekolah harus mengembangkan analisis kebutuhan yang obyektif, bukan sekadar menyalin rencana tahun sebelumnya atau berdasarkan asumsi-asumsi lama. Di sinilah pentingnya integrasi antara data evaluasi kegiatan, asesmen mutu sekolah, dan masukan dari guru, siswa, serta orang tua dalam menyusun prioritas anggaran.

Solusi optimalisasi dana BOS di SDN 386 Gresik menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah bukanlah aktivitas teknokratis semata, melainkan proses kompleks yang



membutuhkan kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan sistem perencanaan yang adaptif. Ketiga solusi tersebut saling menguatkan: pelatihan meningkatkan kemampuan teknis pengelola, keterlibatan komite menjaga akuntabilitas, dan perencanaan terukur menjamin efektivitas penggunaan dana.

Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan dana BOS sangat ditentukan oleh kesadaran bahwa manajemen keuangan adalah instrumen strategis untuk mencapai tujuan pendidikan, bukan sekadar kewajiban administratif. Sekolah yang mampu mengelola BOS secara partisipatif, terencana, dan profesional akan memiliki peluang lebih besar dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dan mencapai standar nasional pendidikan secara berkelanjutan.

## SIMPULAN

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPT SDN 386 Gresik pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan pemerintah, mulai dari aspek perencanaan, penyaluran, penggunaan, hingga pelaporan. Sekolah telah menunjukkan upaya nyata dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan berkala kepada dinas pendidikan serta keterlibatan komite sekolah.

Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan krusial. Masalah utama meliputi keterlambatan penyaluran dana yang berdampak pada kualitas pelaporan, terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sekolah secara menyeluruh, serta perlunya peningkatan kapasitas tim pengelola BOS agar lebih memahami juknis dan tata kelola keuangan. Selain itu, partisipasi komite sekolah dalam proses pengelolaan masih bersifat minimal dan perlu diperkuat.

Untuk mengoptimalkan dana BOS, diperlukan strategi menyeluruh yang mencakup: (1) peningkatan kapasitas teknis pengelola dana melalui pelatihan rutin dan pendampingan berkelanjutan, (2) penguatan peran komite sekolah dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, serta (3) penyusunan perencanaan anggaran yang lebih matang, terukur, dan berbasis kebutuhan prioritas sekolah. Apabila langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, maka dana BOS dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar dan mendorong tercapainya tujuan pendidikan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggun Hilendri, B., & Rahmah, L. (2022). Analysis of Management of School Operational Assistance Funds (Bos) in Sd Negeri 1 Sukamulia, East Lombok Regency. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 389(4). <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- ARISMUN, A., RUSDIANA, R., DERIYANTO, D., & MURTAFAH, N. H. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Smp Negeri 2 Bandarlampung. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(4), 330–336. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i4.1789>
- Futaqi, S., & Machali, I. (2019). Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 231–256. <https://doi.org/10.14421/manageria.2018.32-02>
- Gita, K. K. S. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di Sma



- Negeri 4 Singaraja Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11 (2), 340-348., 11 (2)(2), 340-348.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJA/article/view/34447>
- Hatman, S.Pd.I. (2024, September 20). **Wawancara Pribadi**. Kepala Sekolah UPT SDN 368 Gresik
- Hakiki, S. (2023). *Universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember fakultas ekonomi dan bisnis islam desember 2023*.
- Halik, A., Hidayati, N., & Amin, M. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Tahun 2017 Di Sma Islam Dempo Timur Pasean Pamekasan. *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 07(08), 96-108.  
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/1447>
- Intan, tia putri, & Zulkarnain, Z. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Kejuruan Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(2), 1-13. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i2.8307>
- Kartini Putri, N. T., & Tungga Atmadja, A. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sman 1 Singaraja. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(1), 99-107.  
<https://repo.undiksha.ac.id/7792/%0Ahttps://repo.undiksha.ac.id/7792/10/1717051208-LAMPIRAN.pdf>
- Mogot, T. F. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Sidoarjo (Smanor). *Jurnal Revenue Akuntansi*, 3(2), 98-108.  
<https://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/132/187>
- Muhammad Buang, S.Pd. (2024, September 20). **Wawancara Pribadi**. Bendahara BOS UPT SDN 368 Gresik
- Nugraha, A., Hairani, N. K., & Prisila, R. (2023). Strategi Pengelola Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas. *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(2), 75-80.  
<https://doi.org/10.56832/pema.v3i2.355>
- Nurhayati, A. (2020). Pengaruh Pengelolaan Dana BOS terhadap Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri di Jakarta Selatan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(1), 45-56.
- Utomo, W. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. *Jurnal Akuntabilitas Pendidikan*, 5(1).
- Pradana, Made Adiputra. (2023) Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Public Trust. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 14(3)
- Prayogo, N. (2021). Analisis Framing Robert N Entman Pada Pemberitaan Hoax Seputar "Vaksin Covid 19" Di Media Online Liputan 6.Com Dan Kompas.Com Pada 22 Juni Dan 18 Februari 2021. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 5-24.
- Putri, S. N., & Arif Budiman. (2021). Jurnal Pengetahuan Islam. *Indonesian Journal of Educational Science (IJ)*, 2(1), 17-31.  
<http://ojs.iainsubar.ac.id/index.php/ikhtisar/article/view/26%0Ahttps://ojs.iainsubar.ac.id/index.php/ikhtisar/article/download/26/46>
- Rahayuningsih, S. (2021). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Management of School Operational Assistance Funds (BOS). *Jurnal Studi Islam*, 1(2), 110-117. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/10128>
- Zuldafrial. (2021). Bab 3 Keabsahan data. *Repository Stei*, 20-30.  
<http://www.academia.edu/download/35360663/METODE PENELITIAN KUALITAI F.doc>

